

PEMBERDAYAAN PETANI BERBASIS MODAL SOSIAL DAN KELEMBAGAAN

**Dwi Wahyu Prasetyono*); Sri Juni Woro Astuti*);
Supriyanto*); Ramon Syahrial**)**

*) Program Studi Administrasi Publik Universitas Wijaya Putra

***) Program Studi Agribisnis Universitas Wijaya Putra

E-mail korespondensi : *dwiwahyu@uwp.ac.id*

ABSTRACT

This study is intended to illustrate and explore the collective empowerment of farmer groups based on social capital. The collective context refers to the level of society, which involves three groups of farmer. This study also relates to the evaluation of the implementation process of village partner development program. During the process, empowerment is done by involving farmers' participation. Collective empowerment strengthens the roles and functions of farmer group organizations, in the accumulation of social forces that can bind and mobilize the participation of farmers in empowerment programs. The impact of changes that have occurred on partner farmer groups leads to a strengthening of their capabilities for social change and improved quality of life. Grow positive initiatives from them about what they need to do to strengthen their capabilities to realize the desired future.

Keyword : *empowerment, farmer, collective empowerment*

ABSTRAK

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengilustrasikan dan mengeksplorasi pemberdayaan kolektif kelompok tani berdasarkan modal sosial. Konteks kolektif mengacu pada tingkat masyarakat, yang melibatkan tiga kelompok petani. Studi ini juga berkaitan dengan evaluasi pelaksanaan proses program pengembangan mitra desa. Selama proses berlangsung, pemberdayaan dilakukan dengan melibatkan partisipasi petani. Pemberdayaan kolektif memperkuat peran dan fungsi organisasi kelompok tani, dalam akumulasi kekuatan sosial yang dapat mengikat dan memobilisasi partisipasi petani dalam program pemberdayaan. Dampak perubahan yang terjadi pada kelompok petani mitra mengarah pada penguatan kemampuan mereka untuk perubahan sosial dan peningkatan kualitas hidup. Tumbuh inisiatif positif dari mereka tentang apa yang perlu mereka lakukan untuk memperkuat masa depan mereka.

Kata kunci: pemberdayaan, petani, pemberdayaan kolektif

PENDAHULUAN

Model pembangunan yang didominasi dan dilandasi kepercayaan akan nilai-nilai universal, dari perspektif neo-klasik tersebut, telah menimbulkan krisis dan kesenjangan struktural yang mendalam di lingkungan sosioekonomi, budaya dan ekologi [1], hingga masalah kemiskinan dan masalah lingkungan senantiasa terus berkelanjutan [2]. Masalah kemiskinan berkaitan dengan kekurangan pendapatan untuk memenuhi kehidupan layak [3],

terjadi karena adanya kepincangan distribusi pendapatan dan konsumsi dalam masyarakat [4] merupakan akibat dari kesenjangan struktural.

Pemberdayaan memang telah menjadi agenda pembangunan sejak era orde baru, namun karena kesalahan intervensi yang dilandasi pemahaman yang salah dalam menempatkan eksistensi manusia. Paradigma neo-klasik lebih menekankan *human capital* dalam konteks

individu yang terpisah dari lingkungannya, karena itu konsep pemberdayaan yang terkait dengan penguatan keadilan sosial telah digantikan oleh konsep pembangunan, di mana keberhasilan pembangunan identik dengan pertumbuhan ekonomi, modernisasi, pertumbuhan produksi, privatisasi dan konsumsi [1].

Pemberdayaan dalam gagasan kontemporer berkaitan dengan kerja sosial guna membantu yang tidak berdaya agar menjadi berdaya [5]. Namun demikian implementasi kerja sosial model barat dilegitimasi konsep pembangunan dalam paradigma neo-klasik, yang berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi dan konsumsi, menempatkan masalah kemiskinan dan masalah sosial, seperti prostitusi, anak jalanan dan *trafficking* dalam terminologi patologi dan masalah pribadi [1]. Pandangan yang demikian menjadikan siapa yang tidak berdaya akan semakin termarginalkan.

Studi ini bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan pemberdayaan kepada petani, dalam konteks kolektif, sebagai jawaban atas marginalisasi petani akibat kegagalan pembangunan yang berpijak pada paradigma neo-klasik. Petani merupakan salah satu kelompok masyarakat yang banyak terbelenggu dalam kemiskinan termarginalkan.

KONSEPTUALISASI

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya alternatif atas kegagalan pembangunan tersebut, guna mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada masyarakat (*society oriented development*) [6] atau pembangunan yang dikendalikan masyarakat (*community driven development*) [2], dimana sumber ide, proses dan hasil pembangunan sejalan dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat.

Karena itu upaya pemberdayaan terhadap manusia haruslah memandang manusia tidak dari individu saja tapi juga dari sisi kolektif dimana manusia menjadi bagian dari masyarakat dan lingkung-

annya, karena keberhasilan pemberdayaana selain ditentukan intervensi yang diberikan juga dipengaruhi oleh karakter masyarakat itu sendiri [7]. Pada konteks kolektivitas masyarakat, akan berkaitan dengan pemanfaatan dan perkuatan modal sosial masyarakat, sebagaimana dijelaskan Adamson dan Bromiley [8], bahwa pemberdayaan yang berkaitan dengan upaya memperbaiki kesejahteraan hanya akan berhasil apabila didasari oleh pengembangan modal sosial. Selain itu pemberdayaan yang bertumpu pada modal sosial akan menumbuhkan prakarsa masyarakat dan kesepakatan yang mengikat tindakan bersama mereka yang pada akhirnya akan memperkuat partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan dirinya [9].

Woolcock dan Narayan [10] menjelaskan bahwa dimensi modal sosial tumbuh di dalam suatu masyarakat yang di dalamnya berisi serangkaian nilai-nilai dan norma-norma serta pola-pola interaksi sosial dalam mengatur kehidupan keseharian para anggota masyarakat itu. Dimensi utama modal sosial terletak pada kemampuan masyarakat untuk bekerjasama membangun suatu jejaring sosial guna mencapai tujuan bersama [11].

Pada dasarnya kemampuan manusia untuk menjalin dan membangun kehidupan bersama sangat tergantung dari kondisi adanya kemauan dari semua anggota komunitas atau masyarakat saling berbagi untuk mencari titik temu nilai-nilai dan norma-norma bersama [12], yang kemudian pada gilirannya menjadikan semua kepentingan individual tunduk pada kepentingan-kepentingan kolektif, seperti kesetiaan, kejujuran, dan *dependability*, yang semua itu hanya dapat diwujudkan dengan adanya sikap saling percaya.

METODE

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam paradigma *post-positivist*, dan mengambil bentuk studi kasus, yang merupakan suatu upaya eksplorasi atas suatu sistem terbatas pada jangka waktu

tertentu dengan melalui koleksi data dari berbagai sumber [13]. Sebagai studi kasus, penelitian ini akan melakukan penyidikan empirik yang digunakan untuk menginvestigasi fenomena terbaru seputar realitas sosial. Selain itu kajian ini dilakukan bersamaan dengan evaluasi program pengembangan desa mitra (PPDM).

Data primer digali dari informan dipilih secara purposif dari ketua dan anggota kelompok tani yang terlibat dalam program, baik melalui wawancara maupun *focus groups discussion* (FGD). Analisis data dilakukan dengan tahapan: (1) Reduksi data (*data reduction*) ini dilakukan terus-menerus selama proses penelitian berlangsung, agar tersaji dalam uraian kalimat-kalimat yang sistematis namun tidak mengurangi ciri alamiah (*natural setting*) dari ungkapan-ungkapan informan; (2) Penyajian data (*data display*) dimaksudkan agar memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. Data-data kualitatif dan kuantitatif disajikan secara simultan untuk memberikan deskripsi yang lebih lengkap; (3) Verifikasi data dalam penelitian kualitatif ini dilakukan secara terus-menerus sepanjang proses penelitian, hingga kesimpulan senantiasa terus dilakukan selama penelitian berlangsung yang melibatkan interpretasi peneliti.

TEMUAN

Revitalisasi kelembagaan kelompok tani

Pemberdayaan dapat dilakukan pada tingkat individu dan kolektif [14], dan pemberdayaan pada tingkat kolektif akan meliputi pemberdayaan pada tingkat organisasi dan masyarakat [2]; [15]; [16]. Penentuan tingkat intervensi dalam pemberdayaan selalu disesuaikan dengan kebutuhan. Sebagaimana dikemukakan di awal, pemberdayaan pada tingkat individu mengikuti perspektif modal manusia, tidak mampu memberikan hasil perubahan masyarakat, maka diperlukan perubahan intervensi pada tingkat kolektif.

Pemberdayaan pada tingkat masyarakat, yang melibatkan beberapa kelompok tani, memberikan dampak terjadinya penguatan pada kelembagaannya, dan memberikan stimulasi kepada para anggota kelompok tani, melalui keikutsertaannya dalam kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang diberikan melalui kelompok tani. Intervensi program kepada kelompok tani, mampu memberikan peran lebih pada organisasi untuk memobilisasi para petani anggota untuk mengikuti dan mendukung program intervensi yang diberikan. Dengan demikian proses pemberdayaan yang melibatkan beberapa kelompok tani, sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat, memberi dampak pada pemberdayaan organisasi kelompok tani, dan dalam pemberdayaan organisasi akan memberi dan bergantung dari pemberdayaan anggotanya [16].

Penyusunan program pemberdayaan yang partisipatif, ditunjukkan dengan prosesnya yang dirancang dengan melibatkan perwakilan yang merepresentasikan masing-masing kelompok tani. Intinya perancangan program dilakukan sendiri oleh kelompok tani yang difasilitasi implementor program. Dengan demikian terjadi adanya revitalisasi fungsi dan peran kelompok tani. Pemberdayaan yang pendekatannya dilakukan mengikuti paradigma *bottom-up* [17], mendukung terjadinya akumulasi kekuatan sosial yang diperlukan untuk pemberdayaan melalui organisasi kelompok tani [18]. Pemberdayaan yang dirancang melalui organisasi kelompok tani, berkekuatan mengikat dan menggerakkan para petani anggota kelompok untuk terlibat aktif memberdayakan dirinya.

Stimuli program yang diberikan pada tingkat kolektif kelompok tani, mendorong terjadinya komunikasi diantara pengurus dengan anggotanya, antar kelompok tani. Pengembangan komunikasi ini, dimulai kemudian mengarah pada terjadinya koordinasi antar anggota dalam satu kelompok tani, dan koordinasi pada akhir antar anggota dalam satu kelompok tani

dan antar kelompok tani terjalin adanya kerjasama [15]. Dengan adanya komunikasi terjadi adanya keterbukaan, hingga menjadikan rasa saling percaya, dan kesadaran akan ketergantungan satu sama lain menjadi lebih tinggi. Dengan demikian menjadikan semakin kuatnya modal sosial dalam kelompok yang ditandai adanya saling keterikatan dan rasa saling percaya [21].

Transfer teknologi tepat guna (TTG)

Pemberdayaan sebagai bagian atau sebagai salah satu wujud pelaksanaan pembangunan sumberdaya manusia, dapat dipandang sebagai upaya membentuk ketahanan.

Ketahanan merupakan kondisi yang memberi ketrampilan dan kemampuan untuk menemukan dan memanfaatkan sumber daya - kekuatan individu untuk mengatasi, menyesuaikan, dan memelihara diri dan komunitas seseorang [19]. Untuk menumbuhkan kemampuan menemukan dan memanfaatkan sumberdaya, maka kepada kelompok tani diberikan perkuatan dalam penerapan teknologi tepat guna. Guna mengatasi terbatasnya pagu pupuk kimia bersubsidi, diberikan ketrampilan untuk mengolah dan memanfaatkan limbah organik dari sawah dan ladang untuk dijadikan pupuk organik. Untuk itu diberikan advokasi akan keuntungan pemanfaatan pupuk organik dalam budidaya komoditas, baik dari aspek teknis maupun ekonomi. Pemberian peralatan dan ketrampilan untuk memproduksi sendiri pupuk organik, diarahkan untuk membentuk ketahanan para petani dalam pemenuhan kebutuhan pupuk. Kedepan diharapkan terjadi kemandirian petani secara kolektif mencukupi kebutuhan sendiri.

Pengembangan program produk unggulan desa oleh kelompok tani, diharapkan dapat memberikan adanya nilai lebih yang dapat memberi keuntungan secara ekonomis. Upaya pengembangan produk pertanian unggulan desa, diawali dengan pelatihan budidaya komoditas,

dimaksudkan untuk dapat memberikan kemampuan petani dalam budi daya mulai dari penyiapan pembenihan dan pengelolaan budidaya lebih lanjut agar menghasilkan produk yang baik secara kuantitas dan kualitas. Intervensi pemberian peralatan dan ketrampilan pembuatan pupuk organik dan budidaya komoditas, merupakan penerapan teknologi tepat guna sebagai penopang transformasi pengetahuan baru kepada masyarakat, untuk meningkatkan kemampuan produktivitas dan kualitas hidupnya [20].

Tumbuh-kembangnya kemampuan petani dalam menyediakan pupuk untuk mereka (dari oleh dan untuk mereka secara kolektif para kelompok tani), selain mengatasi masalah keterbatasan pagu pupuk kimia, juga akan mengarah pada inovasi untuk merubah usaha pertanian ke arah *organic farming*. Pengembangan komoditas unggulan desa dan *organic farming* akan merupakan pembeda dengan produk pihak lain. Penerapan teknologi tepat guna tersebut pada dasarnya merupakan upaya terpadu dalam pengembangan desain produk atau inovasi yang meliputi aspek sosial dan budaya [20].

Perubahan sosial

Intervensi pemberdayaan kepada kelompok tani hasilnya merujuk pada terjadinya perubahan pada para petani baik secara individu, kelompok dan masyarakat secara umum, dalam kualitas, yang meliputi pandangan hidup, kemampuan dan pengetahuan, yang semuanya kondusif untuk pengambilan keputusan yang lebih efektif dan penanganan masalah [14].

Pelibatan partisipasi para anggota kelompok tani, dalam penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi hasil program pemberdayaan yang dicapai, mendorong tumbuhnya keberanian dan rasa percaya diri untuk mengajukan ide-ide baru yang merupakan prakarsa mereka dalam memahami masalah yang dihadapi dan bagaimana bertindak untuk menyelesaikan masalah itu. Perdebatan dalam menanggapi prakarsa yang muncul kemudian

memilah dan memilih mana yang sesuai dengan kepentingan bersama mampu menumbuhkan sikap saling menghargai pemikiran pihak lain.

Dari prakarsa yang diajukan, dan yang disepakati sebagai penyelesaian masalah, ditopang dengan stimuli TTG dan pelatihan ketrampilan yang diberikan, menumbuhkan sebuah kesadaran bahwa mereka juga bisa dan mampu berbuat lebih baik dan memberi nilai lebih dalam hidupnya.

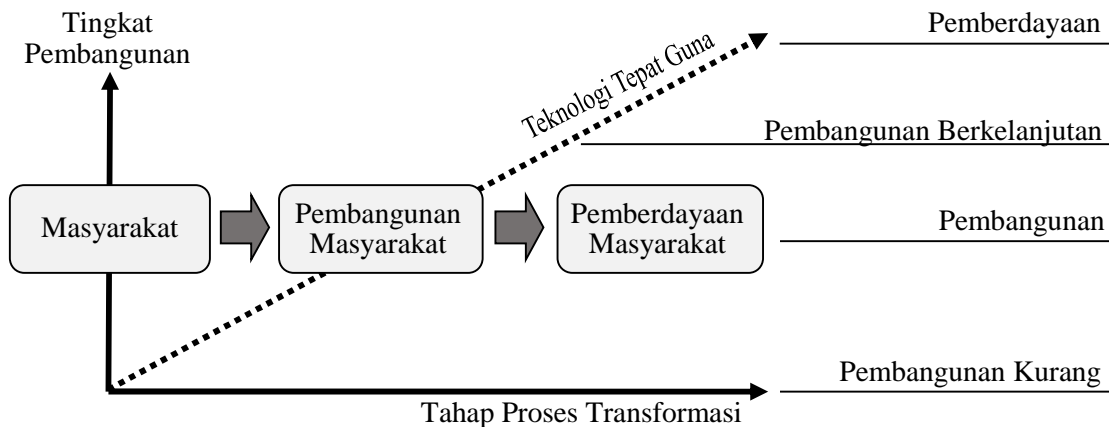
Setidaknya pada aspek penyediaan pupuk, mereka memandang bahwa hal itu dapat mereka sediakan sendiri dengan kemampuan sendiri. Kepercayaan pada kemampuan diri sendiri para kelompok tani dalam proses pembibitan dan penyediaan bibit siap tamen pada komoditas tertentu yang bernilai tinggi, yang sebelumnya tergantung pada pihak lain.

Pengorganisasian penyusunan dan pelaksanaan program pemberdayaan melalui kelompok tani, selain memperkuat fungsi dan peran organisasi, dapat lebih memperkuat jalinan kebersamaan para petani. Para petani merasakan akan manfaat program, aspirasi dan harapannya dapat diupayakan mewujudkannya secara bersama melalui kelompok tani. Dengan demikian pemberdayaan dapat membentuk apa yang dijelaskan Reininger et all [15] sebagai perkuatan pada *inclusivity*. Perubahan tersebut memiliki dampak psikologis yang mendalam, membangun sumber daya yang pada gilirannya dapat menopang ketahanan, dalam hal kesulitan di masa depan [19].

PEMBAHASAN

Pemberdayaan kepada kelompok tani pada muaranya adalah bagaimana yang bersangkutan melakukan daya upaya dengan menggunakan kemampuannya sendiri untuk memperbaiki kualitas kehidupannya. Pemberdayaan yang prosesnya secara partisipatif, dan mengangkat perspektif dari, oleh dan untuk para petani, dalam konteks individu atau kolektif masing-masing kelompok dan secara kumulatif petani dalam desa, menurut Reininger, et all [19] merupakan perspektif pemberdayaan (baik sisi proses maupun hasil) dalam model kerangka kerja yang berbasis tingkat akar rumput (*grounded in a grassroots perspective of empowerment*).

Pemberdayaan kepada para petani tersebut, dilakukan mengikuti kerangka pikir yang dibangun Sianipar, et all [20], dalam menempatkan pemberdayaan sebagai tindak lanjut dan tujuan pembangunan berkelanjutan, sebagaimana dideskripsikan pada gambar 1. Bahwa masyarakat dengan kekurangan pembangunan harus dikembangkan melalui pembangunan masyarakat. Kemudian, peningkatan pengetahuan akan mendukung pembangunan. Setelah itu, proses transformasi harus terus berlanjut melampaui pembangunan berkelanjutan, yaitu pemberdayaan. Sebagai pendorong proses transformasi, teknologi tepat guna harus diimplementasikan melalui beberapa tahap guna memastikan tumbuhnya efek penerapan teknologi. Tahapan harus mencakup partisipasi dalam pemberdayaan masyarakat, yang juga mencakup pemikiran teknologi dan pemikiran pembangunan yang sesuai.



Gambar 1 : Kerangka Kerja Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Berkelanjutan

Pemberdayaan sebagai bentuk tindak lanjut dari pembangunan yang berkelanjutan, mengarahkan pada terbentuknya kemampuan masyarakat memperbaiki derajat kehidupannya dengan kemampuan menyelesaikan masalah sendiri dengan kekuatan sendiri. Konteks itu yang membedakan pemahaman pemberdayaan dengan pembangunan dan pembangunan berkelanjutan (lihat tabel). Mayer dan Louise [17], menyebutkan bahwa pendekatan pemberdayaan masyarakat biasanya sejalan dengan paradigma

"bottom-up", yang dicirikan tiga karakteristik: (1) memungkinkan masyarakat, untuk mengidentifikasi isu-isu yang penting; (2) memberi kekuatan kepada masyarakat dalam pengambilan keputusan atas semua aspek program, termasuk rancangan, strategi, dan manajemen; dan (3) mengukur keberhasilan bukan dalam hal perbaikan yang dapat diukur dalam hasil intervensi, melainkan secara kualitatif mengukur kontrol anggota masyarakat mengenai keputusan yang mempengaruhi kehidupan dan kesehatan mereka.

Tabel 1: Tahap logika pemberdayaan dalam pembangunan berkelanjutan

Pembangunan	Pihak luar memberi peralatan kepada masyarakat, yang akan digunakan untuk mengembangkan aktivitas
Pembangunan Berkelanjutan	Pihak luar memberi peralatan kepada masyarakat, disertai dengan mengajari cara menggunakan dan merawatnya dengan metode yang lebih baik. Penggunaan dan perawatan peralatan dengan metode yang lebih baik, akan mendukung pengembangan aktivitas masyarakat
Pemberdayaan	Pihak luar memberi peralatan kepada masyarakat, disertai dengan mengajari cara menggunakan dan merawatnya dengan metode yang lebih baik, dan juga mengajari mereka cara membuatnya sendiri, menyesuaikan fungsinya berdasarkan kondisi yang dipersyaratkan.

Sumber : diadiopsi dari Sianipar (et all, 2013)

Pemberdayaan secara kolektif, melibatkan partisipasi masyarakat atau kelompok sasaran, adalah tindakan kolektif masyarakat itu sendiri dalam mengakumulasi kekuatan sosial melalui organisasi guna melakukan perubahan sosial. Dalam perspektif itu Reininger, et all [15] menyebutkan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah usaha yang bersatu dan sistematis oleh sebuah kelompok masyarakat untuk mendapatkan kontrol dan memperbaiki kehidupan agregat mereka dengan mendefinisikan masalah, aset, solusi, dan proses dimana perubahan dapat terjadi, dan dengan membangun kapasitas individu dan kolektif yang dapat memberi energi pada kekuatan dan pengetahuan yang ada di dalam kelembagaan sosial masyarakat itu sendiri.

Kesimpulan

Pemberdayaan merupakan upaya alternatif untuk menjawab kegagalan pembangunan dengan model neo-klasik, yang lebih menekankan pada konteks ekonomi. Pemberdayaan kolektif dalam konteks masyarakat menjadi lebih mengedepan karena kegagalan intervensi yang menempatkan modal manusia dalam konteks individu, juga tidak membuahkan hasil. Pemberdayaan kolektif melalui organisasi pada masyarakat menumbuhkan revitalisasi fungsi dan peran organisasi masyarakat, sekaligus memperkuat akumulasi kekuatan sosial yang diperlukan untuk pijakan pemberdayaan.

Pelibatan partisipasi selama proses pemberdayaan, semakin memperkuat modal sosial, yang mendorong tumbuhnya prakarsa untuk menyelesaikan masalah dan merancang perubahan. Penerapan TTG merupakan stimuli untuk transfer pengetahuan dan skill guna memperkuat kapabilitas masyarakat untuk menyelesaikan masalah sendiri dan mengupayakan perubahan dan perbaikan derajat hidupnya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Jönsson, Jessica H. (2010), Beyond empowerment: Changing local communities, *International Social Work*, Vol. 53,(No.3), pp. 393–406
- [2] Wrihatnolo, Randy R. dan Dwidjowijoto, Ryan Nugroho (2007), *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta, Elex Media Komputindo
- [3] Esmara, Hendra (1986), **Perencanaan dan Pembangunan Indonesia**, PT, Gramedia, Jakarta
- [4] Deaton, Angus (2003), **Measuring poverty**, Research Program Development Studies, Princeton University, January 2003 di internet pada http://www.wws.princeton.edu/rpds/downloads/deaton_povertymeasured.pdf
- [5] McLaughlin, Kenneth (2016), *Empowerment: A critique*, Routledge
- [6] Prasajo, Eko (2013), *People and Society Empowerment: Perspektif Membangun Partisipasi Publik*, Resume hasil penelitian penulis dan tim Pusat Kajian Strategi Pembangunan Sosial dan Politik (PKSPSP) FISIP UI tahun 2003 dalam literatur research dengan judul “Pola dan Mekanisme Pemberdayaan Masyarakat di DKI Jakarta” di internet pada: <http://ekoprasajo.com/wp-content/uploads/2013/12/PerspektifMembangunPartisipasi-Publik.pdf>
- [7] Sjafari, Agus (2010), *Pemberdayaan Keluarga Miskin Melalui Pendekatan Kelompok*, *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 1 No 2, Desember 2010
- [8] Adamson, Dave and Bromiley, Richard (2013), *Community empowerment: learning from practice in community regeneration*, *International Journal of Public Sector Management*, Vol. 26 Iss 3 pp. 190 – 202

- [9] Musta'in Mashud (2016), Teori Modal Sosial (22 April 2016) di internet, pada: http://mustain-ua.com/2016/04/22/teori-modal-sosial/#_ftn1
- [10] Woolcock M. and D. Narayan (2000), Social Capital: Implication for Development Theory, Research, and Policy. World Bank Research Observer, 15(2), August, 225-49. In Elinor Ostrom and T.K. Ahn. 2003. Foundation of Social Capital. Massachusetts: Edward Elgar Publishing Limited.
- [11] Hasbullah, Jousairi (2006), Sosial Kapital: Menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia. Jakarta: MR-United Press.
- [12] Burt. R.S. (1992), Excerpt from The Social Structure of Competition, in Structure Holes: The Social Structure of Competition. Cambridge, MA and London: Harvard University
- [13] Creswell, John W., (1994), *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches*, Sage Publication. Thousand Oaks, California
- [14] Cheung, Yuet We; Mok, Bong-Ho; and Cheung, Tak-Sing (2005), Personal Empowerment and Life Satisfaction Among Self-Help Group Member in Hong Kong, *Small Group Research*, Vol. 36 No. 3 Juni 2005, 354-377
- [15] Reininger, Beilida; Martin, David W.; Ross, Michael; Sinicrope, Pamela Smith and Dinh-Zarr, Tho, (1999), Advancing The Theory and Measurement of Collective Empowerment: a Qualitative Study, *Intl'L. Quarterly of Community Education*, Vol. 25(3) 211-238, 2005-2006, Reprinted from: *Int'l. Quarterly of Community Health Education*, Vol. 19(4) 293-320, 1999-2000
- [16] Kasmel, Anu and Andersen, Pernille Tanggaard (2011), Measurement of Community Empowerment in Three Community Programs in Rapla (Estonia), *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 2011, 8, 799-817
- [17] Mayer, Annette Braunack and Louise, Jennie (2008), The ethics of Community Empowerment: tensions in health promotion theory and practice, *Promotion & Education*, vol. 15, 3: pp. 5-8
- [18] Speer, Paul W. and Hughey, Joseph (1995), Community Organizing: An Ecological Route to Empowerment and Power, *American Journal of Community Psychology*, Vol. 23, No. 5, 1995: pp.729-748
- [19] Brodsky, Anne E. and Cattaneo, Lauren Bennett (2013), A Transconceptual Model of Empowerment and Resilience: Divergence, Convergence and Interactions in Kindred Community Concepts, *American Journal of Community Psychology*, (2013) Vol. 52: 333-346
- [20] Sianipar, Corinthias Pamatang Morgana; Adhiutama, Akbar; Yudoko, Gatot, and Dowaki, Kiyoshi (2013), Community empowerment through appropriate technology: sustaining the sustainable development, *Procedia Environmental Sciences*, 17 (2013), 1007 – 1016
- [21] Fukuyama, Francis (1992), *The End of History and The Last Man*, New York: Free Press